



Katalog BPS : 9302002.51

Jilid II Penggunaan

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BALI 2008– 2012



<http://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**



Katalog BPS : 9302002.51

Jilid II Penggunaan

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI BALI
2008 – 2012**

<http://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI BALI
2008– 2012**

**No. Publikasi : 51550.1302
Katalog BPS : 9302002.51
Ukuran Buku : 17,6 X 25 Cm
Jumlah Halaman : 86 + x**

Naskah :

**Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
*Regional Accounts and Analysis Statistic Division***

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR



Sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS bertanggung jawab atas perstatistikan di Indonesia, termasuk perstatistikan di daerah. Karena itu, penyediaan data makro sebagai hasil dari kegiatan statistik merupakan tanggung jawab BPS sesuai tuntutan perundang-undangan. Dari sekian banyak data yang disajikan BPS di level nasional maupun daerah, terdapat beberapa data yang diseminasinya ditunggu berbagai pihak.

Salah satunya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang penyajiannya terekam dalam sebuah buku atau publikasi. Publikasi PDRB Provinsi Bali Tahun 2008 – 2012 Jilid II Penggunaan ini merupakan publikasi rutin tahunan yang menyajikan beberapa indikator makro ekonomi di Provinsi Bali dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan perkembangan PDRB ditinjau dari sisi penggunaan/pengeluaran (*demand side*), baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000.

Disadari bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kendati begitu, selalu diupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran dari pengguna dan pemakai data sangat diharapkan dalam penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Denpasar, April 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'I Gde Suarsa'.

Ir. I Gde Suarsa, M.Si
NIP. 195506281979031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL~ i
KATA PENGANTAR~ iii
DAFTAR ISI ~ v
DAFTAR TABEL ~vii
DAFTAR GAMBAR ~ix

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Fenomena Umum ~ 3
- 1.2. Maksud dan Tujuan ~6
- 1.3. Sumber Data ~7
- 1.4. Sistematika Penulisan ~8

KONSEP DAN DEFINISI

BAB II

- 2.1. Umum~ 13
- 2.2. Konsep PDRB
MenurutKomponenPenggunaan/Pengeluaran~ 17

BAB III RUANG LINGKUP, SUMBER DATA DAN METODE ESTIMASI

- 3.1. PengeluaranKonsumsiRumahtangga~37
- 3.2. PengeluaranLembagaSwastaNirlaba/Non Profit~41
- 3.3. PengeluaranKonsumsiPemerintah~42
- 3.4. Pembentukan Modal TetapDomestikBruto~43
- 3.5. PerubahanStok/Inventori~44
- 3.6. Ekspor - ImporBarangdanJasa~44

**TINJAUAN EKONOMI PROVINSI BALI
MENURUT PDRB PENGGUNAAN**

BAB IV

- 4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
(termasuk lembaga swastana laba/non profit)
~53
- 4.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ~59
- 4.3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto ~62
- 4.4. Ekspor - Impor Barang dan Jasa ~65
- 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB
Menurut Komponen Penggunaan ~68

BAB V

P E N U T U P

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1.** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2008 - 2012 (dalam juta rupiah)~56
- Tabel 4.2.** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2008 - 2012 (dalam juta rupiah)~56
- Tabel 4.3.** LajuPertumbuhan PDRB Provinsi Bali MenurutKomponenPenggunaanTahun 2008 – 2012~68
- Tabel 4.4.** Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut komponen Penggunaan Tahun 2008 – 2012 (Dalam persen) ~69

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1.** Kontribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008- 2012~52
- Gambar 4.2.** Kontribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2008 – 2012 (dalam persen)~57
- Gambar 4.3.** Konsumsi Rumah Tangga ADHK (milyar rupiah) dan Pertumbuhan (dalam persen), Tahun 2008 – 2012 ~58
- Gambar 4.4.** PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Konsumsi Pemerintah Tahun 2008 - 2012~61
- Gambar 4.5.** PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Tahun 2008 – 2012~64
- Gambar 4.6.** PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Ekspor Tahun 2003 – 2012~66
- Gambar 4.7.** PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Impor Tahun 2008 – 2012~67

Bab I

PENDAHULUAN

- Fenomena Umum
- Maksud dan Tujuan
- Sumber Data
- Sistematika Penulisan

<http://bali.pps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

1.1. Fenomena Umum

Meskipun masih dibayang-bayangi krisis ekonomi global, perekonomian Bali pada dua tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi ditahun 2011 yang ditargetkan sebesar 6,36 persen mampu dilampaui. Pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2011 mampu tumbuh hingga 6,49 persen. Pertumbuhan ini berdampak positif terhadap berbagai indikator kesejahteraan seperti penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka turun hingga tinggal 2,32 persen, sementara angka kemiskinan mampu ditekan hingga 4,59 persen.

“ ... Kondisi perekonomian Provinsi Bali Tahun 2012 dapat dikatakan cukup baik, dengan nilai pertumbuhan ekonomi secara *year on year* sebesar 6,65 persen, lebih tinggi dibandingkan target target pertumbuhan pemerintah Provinsi Bali sebesar 6,57 persen... “

Membaiknya kondisi perekonomian Bali berlanjut di tahun 2012. Kondisi perekonomian Provinsi Bali Tahun 2012 dapat dikatakan cukup baik. Hal iniditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekonomi secara *year on year* sebesar 6,65 persen, lebih tinggi dibandingkan target target pertumbuhan pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2012 yang sebesar 6,57 persen. Pertumbuhan ekonomi ini tentu tidak terlepas dari peningkatan berbagai indikator yang menjadi barometer perekonomian Bali seperti kunjungan wisatawan dan investasi. Peningkatan kunjungan wisatawan secara langsung memberikan dampak bagi sektor perdagangan hotel dan restoran, demikian pula peningkatan investasi, baik dari pemerintah

maupun swasta mampu mendorong perekonomian dari sisi penggunaan, dan dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan dampak ke semua sektor perekonomian yang ada. Pesatnya investasi tidak terlepas dari peningkatan investasi swasta berupa pembangunan hotel dan kondominium di sekitar objek wisata serta pembangunan fasilitas transportasi seperti pembangunan *under pass* Dewa Ruci, Jalan Tol Benoa-Nusa Dua, serta perluasan Bandara Ngurah Rai.

Membbaiknya kondisi perekonomian di tahun 2012 juga terlihat dari perkembangan harga-harga yang relatif stabil. Selama tahun 2012, perkembangan harga yang dilihat dari angka inflasi mampu dijaga dengan tingkat inflasi dibawah 1,00 persen, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi di bulan Januari (0,90%), Februari (0,63%), dan Juli (0,72%). Sementara itu berdasarkan hasil pemantauan harga-harga di bulan Desember 2012, di Kota Denpasar terjadi inflasi sebesar 0,58 persen. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2012 sebesar 4,71 persen dan laju inflasi "*Year on Year*" (Desember 2012 terhadap Desember 2011) sebesar 4,71 persen.

Kinerja pariwisata sebagai motor perekonomian juga terbilang membaik, dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang. Hal ini terlihat dari terlampauinya target kunjungan wisman hingga 2,8 juta wisman. Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang

berkunjung ke Bali mencapai 2.949.332 orang. Dengan rata-rata kunjungan wisman per bulan mencapai 245 ribu orang.

Membaiknya kinerja perekonomian di tahun 2012 berdampak secara langsung pada penyerapan tenaga kerja. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya menurunkan tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada Agustus 2012 mencapai 2,04 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2011 sebesar 2,32 persen.

Berbagai indikator capaian pembangunan di atas tentu sangat diperlukan dalam proses pembangunan ke depan, baik sebagai evaluasi kinerja pembangunan yang telah berjalan, maupun bahan perencanaan untuk pembangunan ke depan yang lebih baik, khususnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu indikator makro menjadi sangat penting, termasuk indikator yang menggambarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi/usaha dalam suatu wilayah dan waktu tertentu yang dikenal dengan PDRB menurut lapangan usaha (*supply side*) atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir (PDRB menurut penggunaan/*demand side*).

Publikasi ini menyajikan data PDRB menurut komponen penggunaan/pengeluaran selama periode tahun 2008 – 2012, dan analisis deskriptif tentang PDRB menurut komponen penggunaan tersebut. Penyajian PDRB menurut komponen penggunaan dibedakan menjadi

PDRB atas dasar harga berlaku, dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB komponen penggunaan atas dasar harga berlaku menunjukkan jumlah pengeluaran dari komponen penggunaan pada tahun berjalan, sedangkan PDRB komponen penggunaan atas dasar harga konstan menunjukkan jumlah pengeluaran dari komponen penggunaan dinilai dengan harga pada tahun dasar, di mana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000.

Komponen-komponen PDRB menurut penggunaan meliputi: (1) pengeluaran konsumsi rumahtangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba/ non profit; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) pembentukan modal tetap domestik bruto/PMTDB; (5) perubahan stok/inventori, dan (6) ekspor neto, yakni ekspor dikurangi impor. Jumlah pengeluaran semua komponen penggunaan tadi sama dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi atau PDRB sektoral menurut lapangan usaha.

1.2. Maksud dan Tujuan

Publikasi PDRB Provinsi Bali 2008 – 2012 Jilid II Penggunaan ini berisi data potensi ekonomi Provinsi Bali dilihat dari pendekatan komponen penggunaan atau pengeluaran, yang meliputi pengeluaran konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba/non profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), perubahan stok/inventori, dan ekspor – impor barang dan jasa. Selain itu, disajikan pula analisis deskriptif yang secara ringkas menguraikan

perkembangan PDRB komponen penggunaan ekonomi Bali selama periode tahun 2008 – 2012.

1.3. Sumber Data

Sumberdata yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah hasil pengumpulan dan penghitungan data yang dilakukan oleh BPS. Sumber data tersebut antara lain. Pertama, sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan pengeluaran konsumsi rumahtangga antara lain bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Biaya Hidup (SBH). Kedua, sumber data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba/non profit diperoleh dari hasil survei khusus.

Ketiga, sumber data untuk pengeluaran konsumsi pemerintah digunakan berbagai macam data seperti data realisasi APBD Provinsi Bali, jumlah PNS, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, serta Indeks Harga Konsumen. Keempat, sumber data yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) adalah output bangunan dari sektor konstruksi; data usaha menengah besar (UMB), dan usaha mikro kecil (UMK) hasil Sensus Ekonomi 2006; survei lapangan; dan indeks implisit PMTDB.

Kelima, sumber data untuk pendekatan perubahan stok/inventori adalah data komoditi pertambangan dan penggalan dari publikasi statistik pertambangan dan

penggalian; data komoditas perkebunan; laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait; indeks harga implisit PDRB sektoral terpilih; dan IHPB terpilih, dan keenam, sumber data untuk ekspor-impor barang dan jasa didekati melalui beragam sumber seperti publikasi statistik ekspor dan impor barang dari BPS; pencatatan administrator pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan udara (bandara) maupun darat/terminal apabila memungkinkan; serta survei-survei khusus baik yang bersifat pengumpulan data primer maupun data sekunder.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, publikasi ini mencakup lima bab di mana masing-masing bab menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. ***Bab I Pendahuluan***. Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum, maksud dan tujuan, serta sumber data dan sistematika penulisan.
2. ***Bab II Konsep dan Definisi***. Pada bab ini memuat tentang konsep dan definisi yang digunakan dalam menghitung PDRB Provinsi Bali menurut komponen penggunaan atau pengeluaran selama periode tahun 2008 – 2012.
3. ***Bab III Ruang Lingkup, Sumber Data dan Metode Estimasi***. Pada bagian ini menguraikan tentang sumber data yang digunakan dalam pengukuran PDRB menurut komponen penggunaan dan metode estimasi

yang digunakan untuk masing-masing komponen penggunaan.

4. **Bab IV Tinjauan Ekonomi Provinsi Bali Menurut PDRB Penggunaan.** Bab ini berisi analisis deskriptif mengenai perkembangan perekonomian Bali bila dilihat dari sisi PDRB menurut komponen penggunaan selama periode tahun 2008 – 2012.
5. **Bab V Penutup.** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penghitungan dan analisis deskriptif PDRB Provinsi Bali menurut komponen penggunaan selama periode tahun 2008 – 2012.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

Bab II

KONSEP DAN DEFINISI

- ❑ Umum
- ❑ Konsep PDRB
Menurut Komponen Penggunaan/Pengeluaran

<http://bali.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

2.1. Umum

PDRB menurut komponen penggunaan atau pengeluaran (*demand side*) dapat dibedakan atas dua kategori utama, yakni menurut **pelaku**

ekonomi dan menurut **jenis**

transaksi. Pelaku ekonomi

terdiri atas rumahtangga

(rumahtangga biasa dan

rumahtangga khusus

didasarkan pada konsep

residen); lembaga non profit

pelayan rumahtangga (LNPRT);

pemerintah (pusat dan

daerah); investor (pelaku

investasi fisik); serta luar daerah/wilayah dan luar negeri

(eksportir dan importir), sedangkan jenis transaksinya

digolongkan menurut pengeluaran untuk penggunaan

berbagai produk sebagai konsumsi akhir serta untuk

investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik

Bruto/PMTDB dan perubahan stok/inventori).

Selanjutnya pada transaksi eksternal perlu

dibedakan dengan pihak mana transaksi tersebut

dilakukan (domestik atau luar negeri). Pada umumnya

transaksi ekspor dan impor (antar wilayah/negara)

digolongkan hanya berdasarkan sifat dan jenis produk.

Penggolongan menurut transaksi yang dilakukan oleh

berbagai pelaku ekonomi dalam wilayah ini disebut

sebagai pengeluaran atau penggunaan konsumsi akhir.

“ ... PDRB dari sisi penggunaan lebih menjelaskan tentang bagaimana pendapatan yang diciptakan melalui proses ekonomi dari berbagai macam sektor produksi yang digunakan oleh berbagai institusi domestik (rumahtangga, lembaga swasta non profit, pemerintah, serta sektor produksi/produsen di wilayah domestik) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya ... “

Disebut akhir karena tidak akan diproses produksi lebih lanjut dalam wilayah domestik. Komponen selain permintaan akhir adalah permintaan antara. Sementara itu untuk barang impor meskipun sebagian dari produknya untuk tujuan diproses lebih lanjut, tetapi diperlakukan berbeda. Sama halnya dengan ekspor, data impor hanya disajikan secara total.

Selanjutnya transaksi-transaksi tersebut yang akan menjadidasar penggolongan PDRB menurut permintaan/penggunaan akhir ini --- dengan kata lain disebut sebagai pengeluaran konsumsi akhir --- dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Konsumsi akhir, terdiri dari komponen rumahtangga, lembaga non profit yang melayani rumahtangga, dan pemerintah.
2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)
3. Perubahan inventori (persediaan)
4. Perdagangan antar wilayah:
 - 4.1. Keluar (domestik, *outflow*)
 - 4.2. Masuk (domestik, *inflow*)
5. Perdagangan antar negara:
 - 5.1. Ekspor (luar negeri, *outflow*)
 - 5.2. Impor (luar negeri, *inflow*)
6. Diskrepansi statistik, yakni perbedaan dengan hasil perhitungan PDRB dari pendekatan lain (umumnya sisi sektoral).

Dengan demikian, maka penggolongan tersebut merupakan kombinasi antara jenis transaksi, pelaku

transaksi, serta wilayah transaksi yang keseluruhannya dirinci sesuai dengan kepentingan analisis. Penilaian PDRB menurut pengeluaran/penggunaan umum dilakukan dengan pendekatan arus komoditi (*commodity flow*), yang dengan kata lain disebut sebagai pendekatan tidak langsung (*indirect method*). Hingga kini, pendekatan dengan cara konvensional ini masih digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia karena dianggap sebagai cara yang relatif mudah, praktis dan efisien.

Pendekatan arus komoditi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap berbagai produk barang dan jasa (komoditas) baik yang berasal dari produk domestik maupun impor yang dikonsumsi oleh pelaku-pelaku ekonomi bersangkutan. Karena informasi yang dapat diperoleh dari masing-masing segmen pelaku konsumsi akhir bersangkutan belum memadai (kelengkapan, akurasi dan kesinambungan) menyebabkan metode ini masih direkomendasikan sampai saat ini. Perlu ditambahkan bahwa sebagian besar data konsumsi akhir ini diperoleh dari hasil sistem pencatatan administrasi, kecuali untuk konsumsi rumahtangga yang diperoleh dari berbagai survei rumahtangga.

Penghitungan PDRB dari sisi **penggunaan** lebih menjelaskan tentang bagaimana pendapatan yang diciptakan melalui proses ekonomi dari berbagai macam sektor produksi yang digunakan oleh berbagai institusi domestik --- institusi yang dimaksud di sini adalah rumahtangga, lembaga non profit yang melayani

rumahtangga, pemerintah, serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik --- untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya.

Dengan kata lain, PDRB menurut komponen penggunaan ini menjelaskan tentang penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir, atau dengan istilah lain disebut sebagai pendekatan riil, yang juga sebagai **output akhir (final output)**. Hubungan antara sisi pendapatan dengan sisi pengeluaran atau penggunaan akhir berbagai produk barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor (termasuk yang diekspor) dapat dinyatakan secara matematis dalam model **Keynesian** dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_i + I_s + X - M$$

dimana :

- C_h : Konsumsi rumahtangga
- C_n : Konsumsi lembaga swasta nirlaba/non profit pelayan rumahtangga
- C_g : Konsumsi pemerintah
- I_i : Pembentukan modal tetap domestik bruto
- I_s : Perubahan stok/inventori
- X : Ekspor
- M : Impor
- Y : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi:

$$Y = C + I + X - M$$

di mana :

- C : Konsumsi rumahtangga, termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit, dan konsumsi pemerintahan.
- I : Investasi
- X : Ekspor
- M : Impor

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penyajiannya komponen-komponen PDRB menurut penggunaan adalah sebagai berikut:

- 1). Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
- 2). Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba/non profit pelayan rumahtangga
- 3). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- 4). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
- 5). Perubahan Stok/Inventori
- 6). Ekspor Neto (Ekspor dikurangi Impor)

2.2. Konsep PDRB Menurut Komponen Penggunaan/Pengeluaran

2.2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

Pengeluaran konsumsi rumahtangga merupakan pengeluaran rumahtangga atas barang dan jasa untuk

tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (*final consumer*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Rumah tangga didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu bangunan tempat tinggal. Mereka secara bersama mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa yang utamanya berupa kelompok makanan dan perumahan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi, dikurangi hasil penjualan neto (penjualan dikurangi pembelian) barang bekas atau apikoran pada periode waktu tertentu.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi seluruh pengeluaran konsumsi atas barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan. Penduduk suatu wilayah di sini dengan menggunakan konsep residen, yakni unit institusi yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi (*centre of economic interest*) dalam batas ekonomi suatu daerah dan lama tinggal (*length of stay*) yang relatif panjang (satu tahun). Unit ekonomi yang bukan merupakan residen suatu daerah dianggap sebagai sektor luar daerah/luar negeri/asing (*non resident*).

Sementara barang dan jasa yang dimaksud antara lain dalam bentuk:

1. Makanan dan minuman, baik dalam bentuk bahan mentah maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok.
2. Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, dan air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*).
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala.
4. Barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan dan tanaman hias.
5. Barang lain seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo dll), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dll), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, dan lain sebagainya.
6. Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dll), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus, dll), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga.
7. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
8. Pemberian/hadiah yang diterima dari pihak lain.
9. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di

luar negeri selain masuk sebagai konsumsi rumahtangga juga diperlakukan sebagai transaksi impor, sedangkan pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan.

Pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali) seperti hasil karya seni dan barang antik (yang dihitung nilai marjinnya). Sekalipun barang tersebut sudah dinilai pada saat diproduksi, tetapi karena nilainya cenderung naik, maka umumnya dari waktu ke waktu harga barang tersebut relatif lebih mahal. Pembelian atas produk lama semacam ini diperlakukan sebagai investasi barang berharga. Diperhitungkannya nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri adalah karena dalam hal ini rumahtangga pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi diri sendiri.

Imputasi sewa rumah adalah perkiraan nilai sewa atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut adalah milik sendiri. Apabila rumahtangga benar-benar menyewa rumah, maka yang diperhitungkannya adalah nilai sewa yang sebenarnya dibayar, baik dibayar secara penuh maupun tidak (karena mendapat subsidi).

Dalam komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga termasuk imputasi atas jasa layanan lembaga keuangan seperti bank, yang disebut sebagai FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured*), atau dalam konsep SNA'68 disebut sebagai *imputed bank service charge (IBSC)*. Pengeluaran tersebut

berupa perkiraan nilai jasa layanan lembaga keuangan atas tabungan dan pinjaman yang dinyatakan dalam bentuk transaksi bunga. Bunga diperlakukan sebagai pendapatan kepemilikan (*property income*), yang bukan terjadi dari proses produksi. Transaksi pembayaran maupun penerimaan bunga oleh rumahtangga tidak digolongkan sebagai aktivitas produksi, tetapi sebagai bagian dari transaksi penerimaan lain (*property income*).

Pengeluaran rumahtangga berupa barang dan jasa untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal tidak termasuk pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga, contohnya pembelian barang untuk keperluan usaha, perbaikan besar dan pembelian rumah, dan lain sebagainya. Pengeluaran rumahtangga untuk keperluan transfer baik berupa uang atau barang tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga.

2.2.2. Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba/Non Profit

Pengeluaran lembaga swasta nirlaba (tidak mencari untung) adalah lembaga swasta yang dalam operasinya bertujuan tidak mencari keuntungan. Lembaga swasta nirlaba/tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat, seperti serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan formal maupun non formal, badan-badan kesehatan, palang merah,

rumah yatim piatu/panti asuhan, penyantunan orang cacat dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang tidak mementingkan keuntungan.

Pengeluaran konsumsi lembaga ini meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, penerimaan transfer barang dan jasa, pembayaran upah gaji, penyusutan dan pajak tak langsung neto dikurangi dengan penjualan neto barang-barang bekas. Bila keuangan suatu lembaga dan pengawasan dikelola oleh pemerintah baik sepenuhnya atau sebagian besar, maka kegiatannya dimasukkan pada kegiatan pemerintah. Apabila lembaga ini melakukan kegiatan produksi seperti jasa kesehatan yang dirancang untuk memperoleh surplus usaha, maka pengeluaran yang termasuk lembaga swasta ini hanyalah kegiatan organisasi yang mengkoordinasi kegiatan yang hanya untuk menutupi biaya operasionalnya saja.

2.2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial (biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah).

Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non pasar pemerintah.

Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan tersebut adalah:

1. Kegiatan di instansi pemerintah yang memproduksi barang sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan induknya. Sebagai contoh, pencetakan publikasi, kartu pos dan reproduksi dari karya seni, pembibitan tanaman dari kebun percobaan, dan lain sebagainya. Penjualan barang-barang ini bersifat insidentil dari fungsi pokok lembaga/departemen pemerintah tersebut, dan hasil penjualannya disebut **pendapatan dari barang yang dihasilkan**.
2. Kegiatan pemerintah yang menghasilkan jasa seperti kegiatan rumah sakit, sekolah, universitas, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni, yang dibiayai dari keuangan pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai/sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil kegiatan seperti ini disebut **pendapatan dari jasa yang diberikan**.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah meliputi:

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, yakni pengeluaran yang diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, *social security*, *sports*, rekreasi, kebudayaan, dan lain sebagainya).
2. Pengeluaran konsumsi untuk kolektif, yakni pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan barang dan jasa publik (administrasi publik, pertahanan, keamanan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi, R&D, dan lain sebagainya).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah juga mencakup pengeluaran pemerintah sebagai transfer berupa barang dan belanja/pembelian makanan/minuman oleh pemerintah untuk membantu korban bencana. **Pengeluaran konsumsi pemerintah** (umum) meliputi konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun kantor wilayah (unit vertikalnya) di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa beserta perangkat dinasnya pada masing-masing tingkat pemerintahan tersebut.

Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah provinsi mencakup konsumsi pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan konsumsi pemerintah pusat yang menjadi

bagian dari konsumsi pemerintah daerah provinsi. Dengan menggunakan cara yang sama, **pengeluaran konsumsi pemerintah (kabupaten/kota)** mencakup konsumsi pemerintah desa, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, ditambah dengan konsumsi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang menjadi bagian dari konsumsi pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.2.4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan. PMTDB dalam Sistem Neraca Nasional merupakan bagian dari pembentukan modal bruto. PMTDB didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, dikurangi penjualan neto barang modal bekas.

Diperhitungkannya barang modal bekas dari luar negeri sebagai barang modal baru di dalam negeri, karena nilainya secara ekonomis belum diperhitungkan. Barang modal dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTDB yang terdiri dari berbagai jenis dan wujud barang modal (kapital) ini dapat dibedakan menjadi tiga penggolongan atau klasifikasi pokok, yakni: menurut jenis barang, menurut sektor penguasa/pemilik (*holder*) dan

menurut institusi. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis barang modal, perilaku pemilikan/penguasaan barang modal serta institusi atau kelembagaan yang menguasainya, dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

1. PMTDB Menurut Jenis Barang, terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) tetap baik baru maupun bekas yang dirinci menurut jenis aset seperti: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan peralatannya, kendaraan dan ternak.
- b. Perbaikan besar aset berwujud
- c. Biaya transfer kepemilikan aset

2. PMTDB Menurut Sektor/Lapangan Usaha

PMTDB menurut sektor/lapangan usaha adalah barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh sektor-sektor ekonomi produksi (produsen) yang digunakan dalam proses produksinya. Sektor-sektor ekonomi yang secara garis besar terdiri dari sektor primer, sekunder dan tersier ini secara rinci terdiri atas sembilan lapangan usaha/sektor ekonomi, yakni: (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan/konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8)

lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa.

Rincian PMTDB pada setiap lapangan usaha/sector ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pada sektor pertanian mencakup semua bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil produksi, bangunan dan saluran air untuk irigasi, peningkatan mutu tanah, penanaman dan perluasan perkebunan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian, serta perbaikan besar-besaran atas mesin tersebut, dan pembelian ternak perah dan ternak yang dipelihara untuk diambil susu atau telurnya serta alat-alat penangkapan ikan dan tempat pemeliharaannya.
2. Pada sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari perluasan areal pertambangan dan bangunannya; mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan pertambangan serta perbaikannya; kendaraan/alat pengangkut yang dipakai dalam usaha pertambangan dan barang-barang modal lainnya yang digunakan sebagai alat dalam berproduksi di sektor pertambangan.
3. Pada sektor industri pengolahan adalah semua barang-barang modal seperti

- gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam usaha industri pengolahan termasuk perbaikannya.
4. Pada sektor listrik, gas dan air bersih mencakup pembuatan proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan gardu distribusi beserta kantor-kantornya, dan pembelian/penambahan prasarana produksi di sektor gas dan air minum.
 5. Pada sektor bangunan/konstruksi adalah semua pembelian/penambahan prasarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan konstruksi, termasuk di sini kantor beserta peralatannya, alat-alat besar dan kendaraan yang digunakan dalam menunjang kegiatan sektor bangunan/konstruksi.
 6. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah semua barang modal yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha yang meliputi bangunan bukan tempat tinggal beserta peralatan produksi yang ada, alat-alat transpor dan mesin-mesin yang dipakai, termasuk juga asrama yang disediakan perusahaan untuk tempat tinggal pegawainya.
 7. Pada sektor transportasi dan komunikasi. Modal adalah semua kendaraan yang

dioperasikan antara lain: bus, truk, dan lain-lain, alat-alat angkutan di sungai, laut dan udara, kereta api termasuk kantor-kantor perusahaan jawatan kereta api serta pembuatan jalan-jalan kereta api, dan stasiun-stasiun dengan rambu-rambunya, bangunan bukan tempat tinggal dan kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk menunjang usaha angkutan.

8. Pada sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencakup bangunan bukan tempat tinggal yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perbankan, kendaraan yang dimiliki dan dipakai untuk menunjang kegiatan perbankan. Termasuk juga kantor-kantor perwakilan perbankan beserta peralatan yang digunakan.
9. Pada sektor pemerintahan, terdiri dari barang-barang modal yang dibeli, dibuat atau diadakan oleh pemerintah untuk menunjang terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan saja. Barang-barang modal yang dimaksud adalah seperti gedung-gedung/kantor-kantor pemerintahan, pembelian mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya dan sebagainya, yang semuanya digunakan sebagai alat dari instansi-instansi

pemerintah dalam memberikan jasa/pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di sini pembuatan jalan-jalan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pembelian barang-barang modal oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan negara dalam rangka bantuan pemerintah tidak termasuk dalam pembentukan modal sektor pemerintah melainkan merupakan pembentukan modal oleh perusahaan-perusahaan yang menerima sumbangan tersebut, misalnya pemerintah menyediakan anggaran untuk memperluas pabrik semen, maka semua pengeluaran baik untuk pembuatan bangunannya maupun untuk pembelian mesin-mesin adalah merupakan pembentukan modal di sektor industri pengolahan.

10. Pada sektor jasa-jasa, berupa gedung bioskop, ternak sirkus atau taman hiburan, peralatan kantor, kendaraan dan lain sebagainya.

3. PMTDB Menurut Institusi

Penggolongan ini menjelaskan tentang barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi (institusi) untuk digunakan dalam proses

produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Institusi di sini dibedakan menurut pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta usaha swasta lainnya (termasuk usaha rumahtangga) yang meliputi:

- a. Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk barang modal oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupa, pembuatan gedung atau bangunan kantor, perumahan dinas, bangunan sekolah, bangunan puskesmas, jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya.
- b. BUMN/BUMD, barang modalnya antara lain: lapangan terbang, pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, pesawat terbang dan lain sebagainya.
- c. Swasta dan rumahtangga, barang modal yang dikuasai dapat berupa bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan lain sebagainya.

2.2.5. Perubahan Stok/Inventori

Bersamaan dengan saat terjadinya perubahan tahun dasar pada tingkat nasional dari tahun dasar 1993 ke tahun dasar 2000, yakni pada Triwulan I tahun 2004, komponen perubahan stok/inventori mulai diperkenalkan. Komponen perubahan stok/inventori itu sendiri pengertiannya sama seperti perubahan stok yang sebelumnya digunakan sebagai komponen penyeimbang/sisa pada PDB/PDRB menurut penggunaan.

Stok/inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan stok/inventori adalah selisih antara nilai stok/inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai stok/inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan stok/ inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang stok/inventori yang bisa bermakna penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Pada prinsipnya stok/inventori merupakan persediaan barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi. Barang-barang stok/inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai *input antara* maupun *input akhir*. Klasifikasi stok/inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas:

- a. Barang inventori menurut sektor penghasilnya seperti produk atau hasil dari perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta bangunan/konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yakni semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yakni barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan,

termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.

- d. Barang setengah jadi, yakni barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Ternak untuk tujuan dipotong.
- f. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- g. Pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
- h. Stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir dan gandum.

Karena data mengenai perubahan stok belum tersedia dengan lengkap, komponen ini dihitung sebagai residual (sisa) antara jumlah PDRB menurut lapangan usaha dengan jumlah komponen penggunaan permintaan akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, PMTDB dan ekspor neto. Dengan demikian, dalam penghitungan perubahan stok ini masih terkandung selisih statistik yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

2.2.6. Ekspor – Impor Barang dan Jasa

Ekspor-impor barang dan jasa merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu daerah dengan daerah lain atau dengan penduduk negara lain.

Transaksi tersebut meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi, dan jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi barang di luar daerah. Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, sementara impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa. Pembelian langsung barang dan jasa di wilayah domestik suatu daerah oleh bukan penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai ekspor.

Begitu juga pembelian langsung barang dan jasa di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai impor. Ekspor barang antar negara dinilai dengan harga f.o.b (*free on board*), sedangkan impor barang dinilai dengan harga c.i.f (*cost insurance and freight*). Ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk. Penduduk yang dimaksud di sini adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara, serta lembaga swasta tidak mencari untung yang berada di daerah tersebut.

Bab III

RUANG LINGKUP, SUMBER DATA DAN METODE ESTIMASI

- Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
- Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba/Non Profit
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)
- Perubahan Stok/Inventori
- Ekspor – Impor Barang dan Jasa



Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://balliops.go.id>

3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

Perkiraan nilai konsumsi rumahtangga diperoleh berdasarkan hasil **Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)** Provinsi Bali. Dari hasil Susenas diperoleh data rata-rata konsumsi per kapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi per kapita sebulan untuk

“ ... Sumber data dan metode estimasi yang disajikan dalam publikasi PDRB menurut komponen penggunaan ini tercover ke dalam kelompok pengeluaran konsumsi rumahtangga, lembaga swasta nir laba/non profit, pemerintahan, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto/PMTDB, perubahan stok/inventori, serta ekspor - Impor barang dan jasa ... “

kelompok bukan makanan. Sedangkan untuk harga setiap jenis barang yang dikonsumsi diperoleh rata-rata harga eceran dari Statistik Harga Konsumen Provinsi Bali. Di samping itu, digunakan data penunjang lainnya seperti PDRB per

kapita atas dasar harga konstan, Indeks Harga Konsumen (IHK), dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga terdiri dari:

A. Pengeluaran kelompok makanan terdiri dari pengeluaran untuk:

- 1). Makanan, yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan dan udang segar dan sejenisnya, ikan dan udang yang diawetkan dan sejenisnya, daging segar, daging yang diawetkan, hasil ikutan daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, bumbu-bumbuan dan konsumsi bahan makanan lainnya

- 2). Makanan dan minuman jadi
- 3). Tembakau dan sirih, yang meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu dan tembakau

B. Pengeluaran kelompok bukan makanan terdiri dari pengeluaran untuk:

- 1). Perumahan, bahan bakar, air dan penerangan
- 2). Aneka barang dan jasa
- 3). Pakaian, alas kaki dan tutup kepala
- 4). Pajak dan asuransi
- 5). Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan lainnya seperti pengeluaran untuk keperluan pesta, upacara dan lain sebagainya

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Susenas dengan modul konsumsi dilakukan tiga tahun sekali. Dengan demikian, pengeluaran konsumsi rumahtangga selama setahun diperoleh dari pengeluaran per kapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sesuai dengan dilakukannya Susenas dengan modul konsumsi. Sedangkan perkiraan pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk tahun-tahun berikutnya, dihitung berdasarkan metode sebagai berikut:

3.1.1. Konsumsi Rumahtangga Kelompok Makanan

Model yang digunakan untuk kelompok makanan adalah **fungsi eksponensial**. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan

pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola. Bentuk fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

dimana:

Q_i : Rata-rata konsumsi per kapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan per kapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas

i : Kelompok pengeluaran ke- i ($i = 1, 2, \dots, 11$)

Setelah dilakukan pengujian, koefisien elastisitas b digunakan untuk memperkirakan konsumsi per kapita tahun yang tidak ada data susenas yang menyangkut konsumsi rumah tangga. Dengan menggunakan peubah lain yaitu perubahan pendapatan per kapita (atas dasar harga konstan), konsumsi per kapita (data Susenas), maka konsumsi per kapita tahun berikutnya dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C_{n+1} = C_n + \{ (C_n) (dp) (b) \}$$

di mana:

C_{n+1} : rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita sebulan pada tahun ($n+1$)

- C_n : rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita sebulan pada tahun pelaksanaan Susenas modul konsumsi (n)
- dp : perubahan pendapatan per kapita harga konstan tahun ke-n dengan tahun ke n+1
- b : koefisien elastisitas

Untuk memperoleh nilai konsumsi atas dasar harga berlaku, konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumahtangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dengan harga eceran di pedesaan. Konsumsi rumahtangga atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode revaluasi, artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tetap (tahun dasar).

3.1.2. Konsumsi Rumahtangga Kelompok Bukan Makanan

Perkiraan konsumsi rumahtangga untuk kelompok bukan makanan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan misalnya permintaan terhadap pakaian, dan lain sebagainya. Model yang digunakan sebagai berikut:

$$Q_i = a + b \cdot Y_i$$

di mana:

Q_i : Rata-rata konsumsi per kapita sebulan
(kuantum)

Y_i : Pendapatan per kapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas

i : Kelompok pengeluaran ke- i ($i = 1, 2, \dots, 11$)

Konsumsi rumahtangga atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mendeflasi konsumsi per kapita (nilai data Susenas) dikalikan dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi. IHK yang digunakan adalah indeks yang tahun dasarnya telah disesuaikan dengan tahun dasar deret PDRB.

Nilai konsumsi rumahtangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan total nilai konsumsi atas dasar harga konstan dengan IHK.

3.2. Pengeluaran Lembaga Swasta Nirlaba/Non Profit

Penilaian terhadap barang dan jasa layanan (output) disetarakan dengan biaya yang dikeluarkan (input). Biaya yang dikeluarkan oleh lembaga terdiri dari

nilai penggunaan barang dan (konsumsi) antara dan nilai penggunaan faktor produksi, akan diperoleh penghitungan pengeluaran lembaga swasta yang tidak mencari untung atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk memperkirakan harga konstan digunakan metode deflasi dengan IHK sebagai deflator. IHK yang digunakan sesuai dengan masing-masing kegiatan, atau dapat pula dilakukan cara ekstrapolasi, dengan menggunakan indeks jumlah unit kegiatan atau indeks jumlah tenaga kerja.

3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Penghitungan konsumsi pemerintah dilakukan dengan menggunakan data keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Desa. Data tersebut diperoleh dari daftar survei keuangan Pemerintah Tingkat I (K_1), Tingkat II (K_2) dan Pemerintah desa (K_3). Data keuangan tersebut meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pensiun dan subsidi, belanja pemeliharaan barang, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin lainnya, sedangkan pengeluaran pembangunan terdiri dari pengeluaran terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Selain itu, digunakan juga Neraca Produksi Pemerintah Pusat dan Hankam (atas dasar harga berlaku) dan data jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Dari daftar K_1 ,

K_2 dan K_3 diperoleh pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja rutin lainnya dan belanja pembangunan atas dasar harga berlaku. Perkiraan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk biaya pegawai dihitung dengan cara ekstrapolasi yaitu menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri, sedangkan untuk belanja barang dideflasi dengan menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor.

3.4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)

Penghitungan PMTDB dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: **Pertama**, berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal secara langsung oleh masing-masing lapangan usaha, dan **Kedua**, penghitungan pembentukan modal berdasarkan arus barang (*commodity flow*). Penghitungan PMTDB dengan metode langsung diperoleh dengan cara menghitung pembentukan modal di masing-masing sektor: (1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas dan Air Bersih; (5) Bangunan/Konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-jasa. Sedangkan penghitungan PMTDB dengan

metode arus barang diperoleh dengan menghitung barang modal yang digunakan oleh masing-masing institusi pengguna barang modal tersebut.

3.5. Perubahan Stok/Inventori

Data mengenai perubahan stok/inventori dalam komponen penggunaan PDRB ini masih merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral minus komponen akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto. Jadi di dalam perubahan stok tersebut, masih terkandung selisih statistik atau diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*) yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

3.6. Ekspor - Impor Barang dan Jasa

Data ekspor dan impor untuk daerah Bali masih sangat terbatas dan sulit untuk memperolehnya karena kurangnya kelengkapan data yang tersedia. Ekspor dan impor barang pada dasarnya meliputi perpindahan barang ke luar wilayah provinsi baik ke luar negeri maupun daerah lainnya di luar wilayah provinsi Bali. Data transaksi dengan luar negeri diperoleh dari Statistik Ekspor Impor terbitan BPS.

Sedangkan data ekspor impor antar pulau/provinsi diperoleh dari Statistik Bongkar Muat terbitan BPS, Administrator Pelabuhan (Adpel), Perum Angkasa Pura,

Jembatan Timbang dan survei khusus lainnya. Dari transaksi barang dan jasa tersebut baik dari luar negeri maupun antar pulau/provinsi akan diperoleh nilai atas dasar harga berlaku, sedangkan untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara mendeflasikan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang diperoleh dari Bulletin Ringkas BPS.

<http://bali.bps.go.id>



Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://balliops.go.id>

Bab IV

TINJAUAN EKONOMI PROVINSI BALI MENURUT PDRB PENGGUNAAN

- Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
(termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit)**
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto**
- Ekspor – Impor Barang dan Jasa**
- Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen
Penggunaan**



Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://balliops.go.id>

Di dalam ekonomi sebagai suatu kesatuan, pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok (P.Saliem dan Ariningsih, 2008), yakni: (1) rumahtangga termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit; (2) pemerintah; (3) korporasi; (4) jasa keuangan; dan (5) kelompok luar daerah/luar negeri. Masing-masing institusi tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi, di mana antar

daerah, satu institusi dengan yang lainnya dapat dibedakan berdasarkan fungsian perilakunya dalam sistem perekonomian.

Pada tingkat paling dasar, rumah tangga menyediakan sumber daya berupa faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh korporasi untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi tersebut dapat berupa tenaga kerja, tanah dan modal/kapital. Sebagai balas jasanya, rumahtangga menerima pembayaran dari korporasi berupa upah dan gaji, sewa, dan bunga serta keuntungan (profit dan deviden).

Berkebalikan dengan peran rumahtangga, korporasi mempekerjakan dan memberikan balas jasa atas faktor yang disediakan rumahtangga. Tugas korporasi adalah memproduksi barang dan jasa yang kemudian dikonsumsi oleh rumahtangga, pemerintah, korporasi lain dan pasar luar daerah/luar negeri. Korporasi juga memainkan peran vital dalam pembentukan investasi dalam pengadaan mesin dan peralatan, tanah dan bangunan serta kapasitas produk lainnya.

“ ... Peranan Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik, dan Ekspor masih dominan mendongkrak pertumbuhan pada Bali di tahun 2012, dengan peranan masing-masing sebesar 2,11 persen, 5,17 persen, dan 3,30 persen. ... ”

Seperti halnya korporasi, pemerintah memainkan berbagai peran dalam perekonomian seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan kegiatan lainnya. Kemudian pemerintah memberikan balas jasa berupa upah dan gaji kepada pegawainya yang juga merupakan bagian dari kelompok rumahtangga. Untuk memenuhi konsumsinya, pemerintah memerlukan barang dan jasa konsumsi akhir dari perusahaan.

Di bidang pembentukan modal, pemerintah juga mengeluarkan dana melalui pembangunan jalan baru, bangunan untuk sarana umum seperti rumah sakit, sekolah yang pada akhirnya pemerintah memungut pajak dari individu dan perusahaan untuk mendanai konsumsi pemerintah termasuk pembayaran transfer kepada penduduk yang memerlukan berupa subsidi langsung maupun tidak langsung. Kelompok jasa keuangan berperan menjalankan fungsi intermediasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun dan lain-lain. Institusi ini tidak memproduksi output secara fisik sehingga mereka biasanya dikelompokkan terpisah dari korporasi.

Selanjutnya, meningkatnya ketergantungan antar daerah/negara karena dampak globalisasi, perlunya arus investasi dari luar. Arus modal ini berperan menutup kekurangan tabungan domestik untuk pembiayaan investasi dan belanja konsumsi yang diperlukan penduduk. Peran kelompok ini adalah menyediakan layanan untuk menjembatani antara penabung dan peminjam.

Penabung bisa berasal dari rumahtangga, korporasi, pihak asing dan badan-badan lainnya yang melayani publik. Adapun kelompok luar daerah/luar negeri memberikan sumbangan langsung dalam hal transaksi ekspor dan impor baik untuk transaksi dengan daerah lain maupun dengan luar negeri.

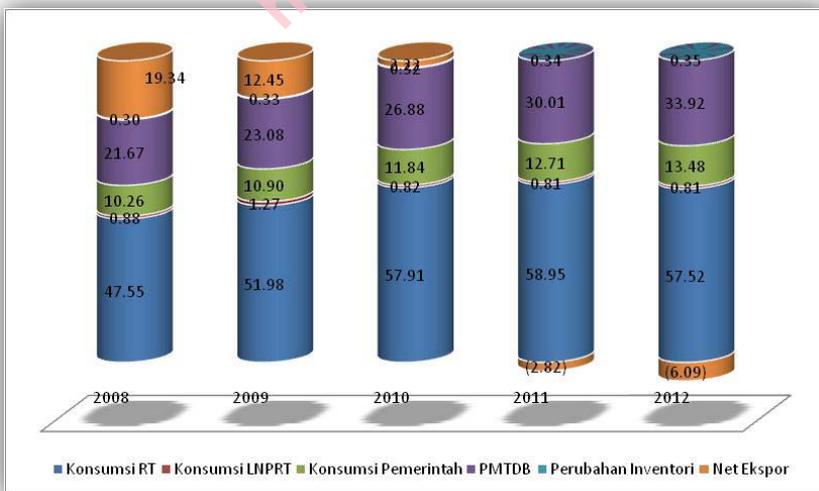
Peranan pelaku perekonomian dalam perekonomian Bali dapat tergambarkan dari pembentukan Produk Domestik Bruto Bali dari sisi pengeluaran/konsumsi (*demand side*). Pertumbuhan ekonomi Bali yang secara *year on year* mencapai 6,65 persen, tidak terlepas dari peranan institusi atau pelaku perekonomian. Peranan Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik, dan Ekspor masih dominan mendorong pertumbuhan pada tahun ini. Masing-masing peranan komponen pengeluaran tersebut terhadap pertumbuhan perekonomian pada tahun 2012 di Provinsi Bali yaitu sebesar 2,11 persen, 5,17 persen, dan 3,30 persen.

Membaiknya perekonomian Bali di tahun 2012 tidak terlepas dari peningkatan peran masing-masing institusi yang ditunjukkan peningkatan komponen penyusun PDRB pengeluaran konsumsi masyarakat selama tahun 2012 tumbuh sebesar 3,50 persen. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba juga mengalami peningkatan 7,22 persen. Peningkatan peran pemerintah dalam mendorong kinerja perekonomian dapat diindikasikan dari peningkatan konsumsi pemerintah, dimana pada tahun 2012 konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 3,74 persen. Indikasi positif

juga ditunjukkan dari pada sisi investasi. Investasi fisik yang tergambar dalam Pembentukan Modal Tetap Domesti Bruto (PMTDB) di tahun 2012 meningkat cukup signifikan sebesar 19,28 persen.

Namun satu hal yang perlu diwaspadai adalah ketergantungan Provinsi Bali terhadap produk-produk luar Bali, yang tergambar dari sisi impornya. Impor Bali baik impor antar pulau maupun luar negeri cukup tinggi. Bahkan pada dua tahun terakhir neraca perdagangan Bali tercatat defisit dimana nilai impor Bali lebih tinggi dibanding nilai ekspornya. Kontribusi masing-masing komponen pada penyusunan PDRB menurut penggunaan selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.

GAMBAR 4.1.
Kontribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008- 2012 (dalam persen)



Catatan: Tidak termasuk perubahan inventori dan diskrepansi statistik

Lebih jauh akan dipaparkan tinjauan ekonomi Provinsi Bali menurut PDRB penggunaan/pengeluaran (*demand side*) selama periode tahun 2010 – 2012 dalam ulasan singkat berikut ini.

4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (termasuk lembaga swasta nirlaba/non profit)

Konsumsi rumah tangga memiliki peranan penting dalam analisis perekonomian secara makro. Konsumsi rumah tangga dipercaya menjadi salah satu penyelamat perekonomian Indonesia khususnya Bali pada saat krisis global melanda. Permintaan domestik, dalam hal ini konsumsi rumah tangga, menjadi pangsa pasar produksi dalam negeri disaat permintaan luar negeri melemah. Peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian terbilang cukup tinggi. Dikebanyakan negara, pengeluaran konsumsi sekitar 60-75persen dari pendapatan nasional.

Konsumsi rumahtangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya (Sukirno,2003:338). Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besarpula pengeluaran konsumsi. Perbandingan besarnya pengeluarankonsumsi terhadap tambahan pendapatan adalah hasrat marjinal untuk berkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume/MPC*). Sedangkan besarnya tambahan pendapatandynamakanhasrat marjinaluntukmenabung(*MarginaltoSave/MPS*).

Pada pengeluaran konsumsi rumah tangga terdapat konsumsi minimum bagi rumah tangga tersebut, yakni besarnya pengeluaran konsumsi yang harus dilakukan, walaupun tidak ada pendapatan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini disebut pengeluaran konsumsi otonom (*outonomous consumption*). Keputusan rumah tangga mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan konsumsi sangat penting untuk analisis jangka panjang karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi.

Pada konteks lain, teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan terbesar yang pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya tabungan (*saving*).

Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar. Sedangkan *saving* akan bertambah besar dengan pesatnya. Kenyataan ini terus kita jumpai sampai tingkat pendapatan tertinggi yang telah kita capai terpenuhi kembali. Sesudah puncak dari pendapatan sebelumnya telah dilewati, maka tambahan pendapatan akan banyak yang menyebabkan bertambahnya pengeluaran untuk konsumsi, se-

dangkal lain pihak bertambahnya *saving* tidak begitu cepat (Reksoprayitno, 2000).

Demikian halnya peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Bali. Dari seluruh komponen penyusun PDRB konsumsi rumah tangga memberikan andil di atas 50 persen. Perkembangan nilai konsumsi rumah tangga (termasuk konsumsi lembaga swasta nirlaba) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan harga berlaku, konsumsi rumah tangga di Provinsi Bali di tahun 2012 tercatat sebesar 39,80 triliun, dua tahun berikutnya, di tahun 2012 konsumsi rumah tangga mencapai Rp49,16 triliun. Ini berarti selama dua tahun terakhir konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 23,49 persen. Peningkatan konsumsi rumah tangga tidak terlepas dari peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, maupun pertumbuhan jumlah penduduk Bali yang pada Sensus Penduduk tahun 2010 lalu mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,15 persen per tahun.

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi faktor fluktuasi harga. Untuk melihat perkembangan konsumsi rumah tangga secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Demikian halnya berdasarkan harga konstan, komponen pengeluaran ini juga cenderung meningkat. Pada tahun 2010, nilai PDRB harga konstan untuk pengeluaran konsumsi masyarakat ini mencapai Rp17,59 triliun. Nilai ini kemudian meningkat menjadi Rp19,55 triliun pada tahun 2012. Secara rata-rata selama periode tahun 2010 – 2012,

nilai tambah bruto atas dasar harga konstan pada komponen pengeluaran ini mencapai Rp18,67 triliun. Ini berarti selama dua tahun terakhir konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 11,17 persen. Selengkapnya dapat disimak pada **Tabel 4.1** dan **Tabel 4.2**.

Tabel 4.1

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2008 – 2012
(Dalam Juta Rupiah)

KOMPONEN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23,874,382.56	30,237,786.79	39,250,824.25	44,398,064.62	48,473,906.00	37,246,992.84
1.1. Makanan	14,643,077.62	17,213,063.62	18,838,599.82	20,627,206.90	21,762,978.60	18,616,985.31
1.2. Non Makanan	9,231,304.94	13,024,723.17	20,412,224.43	23,770,857.72	26,710,927.41	18,630,007.53
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	442,415.75	737,605.73	556,818.81	609,719.31	683,328.05	605,977.53
Jumlah	24,316,798.32	30,975,392.52	39,807,643.06	45,007,783.93	49,157,234.05	37,852,970.38

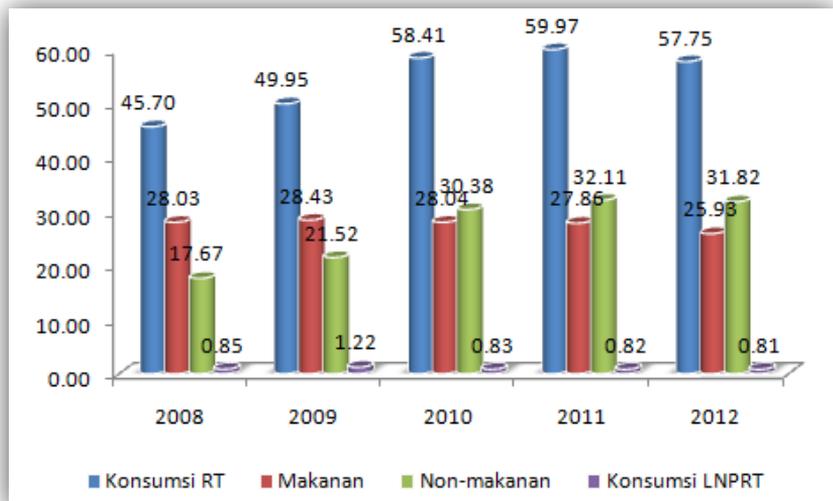
Tabel 4.2

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2008 – 2012

KOMPONEN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
ATAS DASAR HARGA KONSTAN						
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12,787,447.63	15,138,248.80	17,309,034.78	18,580,391.34	19,230,599.80	16,609,144.47
1.1. Makanan	7,461,500.37	8,089,962.51	7,970,401.91	8,329,926.30	8,465,600.14	8,063,478.25
1.2. Non Makanan	5,325,947.26	7,048,286.29	9,338,632.87	10,250,465.04	10,764,999.66	8,545,666.22
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	218,677.82	251,151.32	278,625.28	299,713.98	321,366.52	273,906.98
Jumlah	13,006,125.45	15,389,400.12	17,587,660.05	18,880,105.31	19,551,966.31	16,883,051.45

Peranan konsumsi rumah tangga bagi perekonomian Bali tergolong cukup besar. Meskipun peranan secara umum berfluktuasi, namun rata-rata peranan konsumsi rumah tangga dalam 3 tahun terakhir sebesar 58,71 persen. Di tahun 2010, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Bali telah mencapai angka 58,41 persen terhadap total PDRB Bali, terdiri dari konsumsi makanan (28,04%) dan konsumsi non-makanan (30,38%). Sementara konsumsi lembaga swasta nir-laba berkontribusi sebesar 0,33 persen. Setelah sempat meningkat di tahun 2011, kontribusi rumah tangga di tahun 2012 menurun menjadi 57,75 persen. Demikian halnya kontribusi konsumsi lembaga swasta nirlaba yang hanya sebesar 0,81 persen (lihat **Gambar 4.2**).

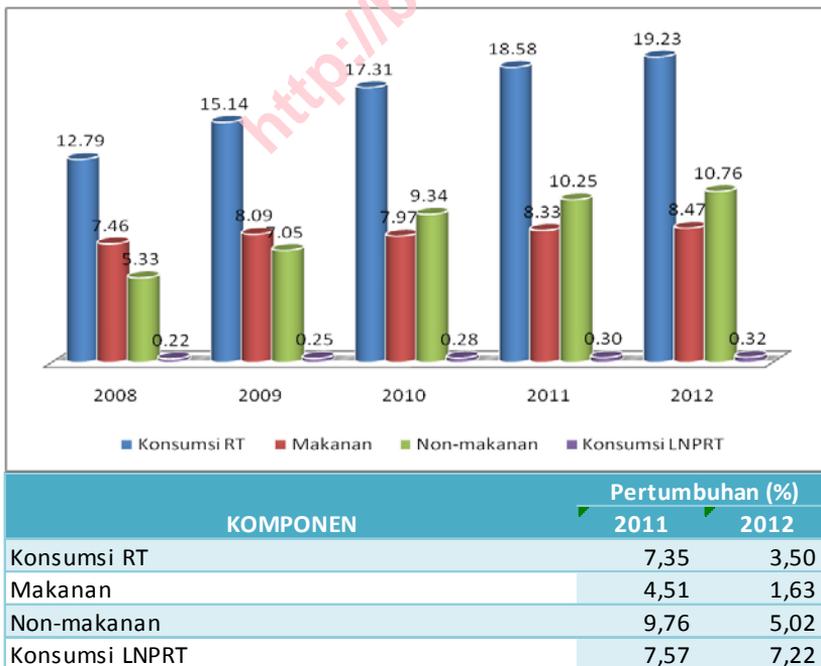
GAMBAR 4.2.
**Kontribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen
Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga
Tahun 2008– 2012 (dalam persen)**



Sumber: BPS Provinsi Bali

Meskipun dari sisi kontribusi mengalami penurunan, secara nominal konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nir-laba meningkat. Penurunan peranan konsumsi rumah tangga tidak terlepas dari peningkatan peran komponen lain seperti konsumsi pemerintah maupun PMTDB. Secara riil dinilai dengan harga konstan, konsumsi rumah tangga selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun demikian di tahun 2012 konsumsi rumah tangga terlihat melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,50 persen. Selengkapnya dapat disimak pada **Gambar 4.3**.

GAMBAR 4.3.
Konsumsi Rumah Tangga ADHK (milyar rupiah)
dan Pertumbuhan (dalam persen),
Tahun 2008–2012



Sumber: BPS Provinsi Bali

Meskipun menjadi sumber penggerak perekonomian dari sisi penggunaan, khususnya dalam menghadapi lemahnya permintaan luar negeri, dalam jangka panjang ekonomi yang sebagian besar digerakkan konsumsi akan mengalami perlambatan, bahkan bisa jadi penurunan karena sebagian besar output atau nilai tambah yang tercipta digunakan untuk konsumsi. Oleh karena itu perlu diimbangi dengan peningkatan dari sisi produksi dan peningkatan pada sisi investasi sehingga roda perekonomian berputar lebih cepat.

4.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Seperti halnya rumah tangga, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan fiskal, sangat berperan dalam kinerja perekonomian kita. Peran pemerintah tidak hanya sebagai konsumen, produsen namun juga sebagai regulator yang mengatur perekonomian melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang tertentu.

Dalam *System of National Accounts* (SNA) 1993 pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik serta mempunyai lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif untuk mengatur suatu wilayah. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa bagi sekelompok atau individu rumah tangga, mengelola penarikan pajak atau pendapatan lainnya, me-

redistribusi pendapatan dan kesejahteraan melalui transfer serta terlibat dalam produksi non-pasar.

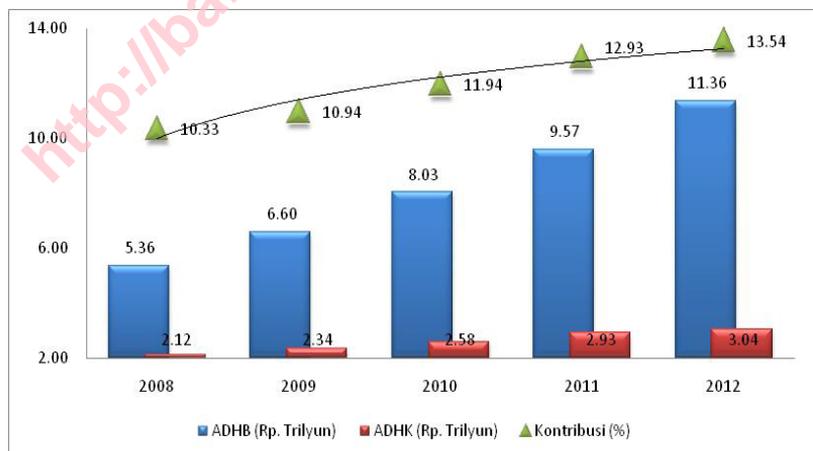
Secara umum, fungsi pemerintah dalam perekonomian modern dapat dibagi menjadi tiga. **Pertama**, Fungsi alokasi, yakni pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. **Kedua**, Fungsi distribusi, yakni pemerintah mengusahakan distribusi dan pemerataan bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, dan **Ketiga**, fungsi stabilisasi, yakni pemerintah mengusahakan stabilisasi dalam perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta (*private*) sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

Mengingat peran pemerintah yang besar dalam perekonomian, maka segala aktivitas ekonomi pemerintah perlu dicatat dan dianalisis lebih lanjut, terutama untuk pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponen penyusun indikator kemajuan perekonomian suatu Daerah yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut penggunaan.

Dalam perekonomian Bali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah memegang peranan yang penting dengan *share* terhadap total penciptaan PDRB. Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah selama kurun waktu 3 tahun terakhir

menunjukkan kecenderungan meningkat. Di tahun 2010, kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,94 persen dengan nilai nominal konsumsi pemerintah sebesar 8,03 trilyun rupiah. Kontribusi ini meningkat di tahun 2011 menjadi 12,93 persen atau sebesar 9,57 trilyun rupiah. Pada tahun 2012 kontribusi pemerintah terhadap total PDRB yang tercipta mencapai 13,54 persen atau secara nominal total pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 11,36 trilyun rupiah (lihat **Gambar 4.4.**).

GAMBAR 4.4.
PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen
Penggunaan Konsumsi Pemerintah Tahun 2008 - 2012



Sumber: BPS Provinsi Bali

Pengeluaran konsumsi pemerintah pada PDRB merupakan keseluruhan pengeluaran konsumsi pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk konsumsi yang berasal dari APBN. Namun demikian sebagai gambaran realisasi

anggaran pendapatan daerah Provinsi Bali di tahun 2012 mencapai 106,92% lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2011 yang sebesar 111,14%. Realisasi pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi terbesar bagi total pendapat daerah, dengan nominal sebesar Rp1,75 triliun. Realisasi pendapatan yang berasal dari pos lain-lain PAD yang sah meningkat cukup tinggi dengan realisasi sebesar 243,44%. Sementara itu realisasi anggaran belanja pemerintah provinsi Bali di tahun 2012 tercatat sebesar 86,84%, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja tahun 2011 yang sebesar 86,25%. Belanja terbesar masih digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin.

4.3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) yang lebih dikenal dengan *investasi fisik* merupakan komponen pengeluaran PDRB yang berhubungan erat dengan proses kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan produksi (*output*) di masa yang akan datang. PMTDB itu sendiri dapat dikelompokkan ke dalam bentuk bangunan/konstruksi, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan. Barang modal tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk memproduksi, dan biasanya mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun.

Investasi merupakan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Sumber daya

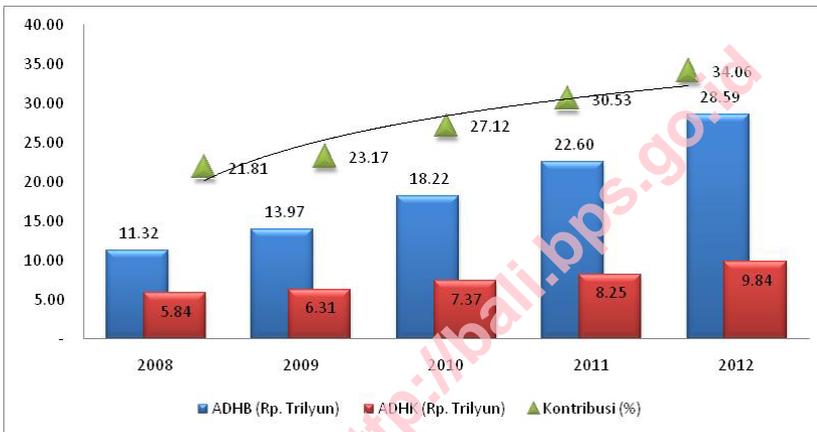
yang ada di masing-masing daerah diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata. Namun dalam memanfaatkan sumberdaya alam perlu memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan. Peranan investasi di Bali cenderung meningkat sejalan dengan banyaknya dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan Bali. Investasi merupakan suatu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi/lapangan usaha.

Selama 3 tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di Bali cukup menggembirakan. Perkembangan investasi fisik yang terlihat dari perkembangan PMTD dalam komponen PDRB Penggunaan selama periode tahun 2010 – 2012, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan untuk komponen PMTD di Bali cenderung mengalami peningkatan. Secara nominal, PMTD di tahun 2012 mencapai 28,59 triliun rupiah, meningkat cukup tajam dibanding kondisi dua tahun sebelumnya. Tahun 2010, PMTD atas dasar harga berlaku hanya sebesar 18,22 triliun rupiah. Meningkat di tahun berikutnya, yakni tahun 2011 dengan nilai nominal investasi sebesar 22,60 triliun rupiah.

Peningkatan nominal PMTD praktis meningkatkan perannya dalam pembentukan PDRB. Seperti terlihat pada **Gambar 4.5** kontribusi komponen PMTD terhadap

PDRB Bali cenderung meningkat pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2010, kontribusinya baru mencapai 27,12 persen. Kontribusi ini meningkat di tahun berikutnya menjadi 30,53 persen. Dan di tahun 2012 kontribusi PMTB terhadap total PDRB mencapai 34,06 persen.

GAMBAR 4.5.
**PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Tahun 2008 – 2012**



Sumber: BPS Provinsi Bali

Peningkatan PMTDB tidak terlepas dari maraknya pembangunan infrastruktur terkait dengan penyelenggaraan APEC. Proyek fisik tersebut antara lain pengembangan Bandara Ngurah Rai dengan total nilai investasi Rp. 2.803 T, dengan realisasi di tahun 2012 sebesar 46,21%, atau rata-rata per triwulan sebesar Rp. 3,23 T, investasi lainnya adalah pembangunan jalan di atas perairan dengan investasi sebesar Rp. 2.49 T, dengan realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar 73,67 %. Pembangunan jalan *under pass* Dewa Ruci juga turut memberikan warna

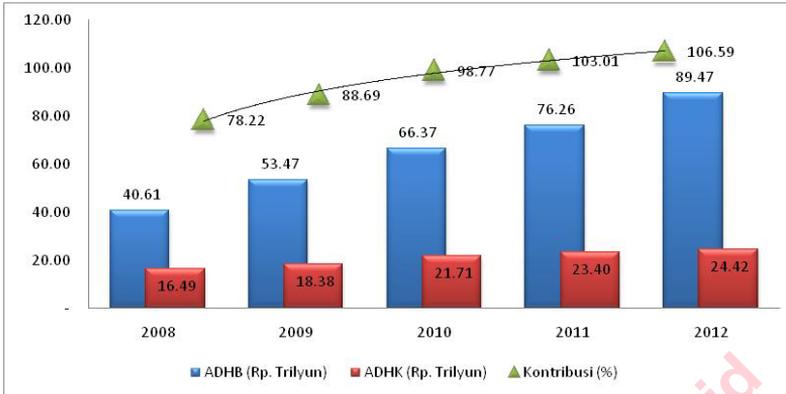
investasi, dengan nilai kontrak dari proyek mencapai Rp 136,19 miliar, disamping beberapa proyek pembangunan hotel yang tersebar di Kota Denpasar dan Kab. Badung.

4.4. Ekspor – Impor Barang dan Jasa

Kemampuan ekspor – impor barang dan jasa, baik antar negara maupun antar provinsi, mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan penciptaan nilai tambah (*value added*). Apalagi kegiatan ekspor – impor itu sendiri memiliki efek ganda (*multiplier effect*), yakni sebagai masukan bagi penerimaan devisa daerah (berupa ekspor) maupun sebagai bagian *supply* barang dan jasa (berupa impor) dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik.

Provinsi Bali yang relatif kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, terutama untuk sumber daya mineral, tentu sangat mengandalkan pasokan barang baik antar pulau maupun luar negeri. Hal ini bisa dilihat dari tingginya arus lalu lintas barang baik yang melalui jalan darat maupun laut. Tingginya ketergantungan Bali akan produk dari luar wilayah diimbangi dengan kinerja ekspornya, khususnya ekspor jasa baik untuk jasa wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik. Disamping itu, Provinsi Bali memiliki beberapa komoditas unggulan untuk ekspor barang. Ekspor barang dari Bali masih didominasi oleh ekspor perikanan, perhiasan, pakaian jadi, kerajinan kayu, dan furniture (7,84%).

GAMBAR 4.6.
PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Ekspor
Tahun 2008 – 2012



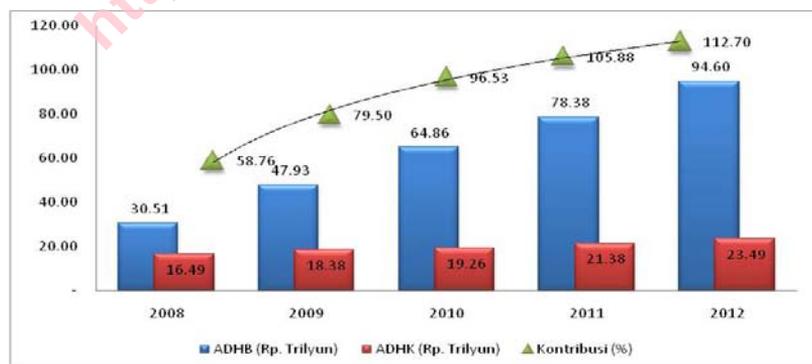
Sumber: BPS Provinsi Bali

Perkembangan ekspor Bali beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja ekspor Bali utamanya ditopang oleh ekspor jasa. Pada tahun 2012 ini nilai nominal ekspor Bali tercatat sebesar 89,47 trilyun rupiah. Nilai ini meningkat cukup tajam dibanding nilai nominal ekspor barang pada dua tahun sebelumnya. Nilai Ekspor pada tahun 2011 tercatat sebesar 76,26 trilyun rupiah, lebih tinggi dibanding ekspor pada tahun sebelumnya yang bernilai sebesar 66,37 trilyun rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 4.6.**

Membbaiknya kondisi ekspor Bali, diikuti dengan peningkatan cukup tajam dari sisi impornya. Seperti terlihat pada gambar 4.6, berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB komponen impor cenderung meningkat bahkan lebih tinggi dibanding peningkatan yang terjadi pada komponen ekspor. Nilai impor yang pada tahun 2010 tercatat sebesar

64,68 trilyun rupiah, meningkat di tahun 2011 menjadi 78,38 trilyun rupiah. Dan di tahun 2012 nilai nominal impor Bali mencapai 94,60 trilyun rupiah. Disamping untuk memenuhi konsumsi domestik, tingginya impor di tahun 2012 salah satunya disebabkan oleh peningkatan permintaan barang-barang untuk mendukung proyek pembangunan di tahun 2012 seperti Pengembangan Bandara Ngurah Rai, pembangunan hotel baru, Jalan di atas laut dan *Underpass* Dewa Ruci, yang mendekati tahap penyelesaian. Indikasinya adalah peningkatan impor pada kelompok komoditas industri alat angkutan, mesin dan peralatannya terutama mesin & Alat berat serta peralatan listrik, termasuk pasokan semen dari luar Bali

GAMBAR 4.7.
PDRB Provinsi Bali Menurut Komponen Penggunaan Impor
Tahun 2008 – 2012



Sumber: BPS Provinsi Bali

4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran/Penggunaan

Secara umum pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tahun 2012 sebesar 6,65 persen, sedikit berakselerasi dibanding tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 6,49 persen. Namun demikian sebagian besar komponen PDRB pengeluaran tercatat melambat dibanding tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2012 tumbuh sebesar 3,50 persen. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba juga mengalami peningkatan 7,22 persen. Indikasi positif juga ditunjukkan pada Konsumsi Pemerintah, dan Ekspor yang masing-masing tumbuh 3,74 persen, dan 4,34 persen. Sementara itu komponen penggunaan yang mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya adalah komponen PMTB dengan pertumbuhan sebesar 19,28 persen.

TABEL 4.3.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut
Komponen Penggunaan Tahun 2008 – 2012 (dalam persen)

KOMPONEN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
LAJU PERTUMBUHAN (ADHK 2000)						
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.43	18.38	9.89	7.35	3.50	8.51
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	8.26	14.85	6.62	7.57	7.22	8.90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.98	10.44	10.01	13.79	3.74	9.19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.16	7.93	16.92	11.83	19.28	15.82
7. Ekspor Barang dan Jasa	16.98	11.46	18.08	7.81	4.34	11.73
8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	36.44	18.84	11.39	10.97	9.87	17.50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.97	5.33	5.83	6.49	6.65	6.06

Sumber : BPS Provinsi Bali

Peranan Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik, dan Ekspor masih

dominan mendorong pertumbuhan pada tahun ini. Peranan masing-masing komponen pengeluaran tersebut terhadap pertumbuhan perekonomian pada tahun 2012 di Provinsi Bali yaitu sebesar 2,11 persen, 5,17 persen, dan 3,30 persen. Sedikit berbeda dibandingkan dengan karakteristik pertumbuhan di tahun sebelumnya, dimana tumbuhnya perekonomian Bali di tahun 2011 sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga dengan *share* pertumbuhan sebesar 4,40 persen dan ekspor sebesar 5,87 persen. Sumber-sumber pertumbuhan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 4.4** berikut.

TABEL 4.4.
Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut
Komponen Penggunaan Tahun 2008 – 2012(dalam persen)

KOMPONEN	2008	2009	2011	2011	2012
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.80	9.44	5.71	4.40	2.11
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.07	0.13	0.06	0.07	0.07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.64	0.85	0.86	1.23	0.36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.49	1.79	3.91	3.02	5.17
5. Perubahan Stok	0.04	0.04	0.01	0.02	(0.07)
7. Ekspor Barang dan Jasa	9.79	7.29	12.18	5.87	3.30
8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	15.90	10.58	7.22	7.31	6.86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.97	5.33	5.83	6.49	6.65



Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://balliops.go.id>

Bab V

P E N U T U P

<http://bali.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

Pertumbuhan ekonomi Bali yang secara *year on year* mencapai 6,65 persen, tidak terlepas dari peranan institusi atau pelaku perekonomian. Peranan Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik, dan Ekspor masih dominan mendorong pertumbuhan pada tahun ini. Peranan komponen pengeluaran tersebut terhadap pertumbuhan perekonomian pada tahun 2012 di Provinsi Bali masing-masing sebesar 2,11 persen, 5,17 persen, dan 3,30 persen.

Pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2012 diwarnai oleh peningkatan investasi terutama investasi fisik terkait dengan perbaikan infrastruktur. Investasi fisik yang tergambar dalam Pembentukan Modal Tetap Domesti Bruto (PMTDB) di tahun 2012 meningkat cukup signifikan sebesar 19,28 persen.

Peningkatan investasi di tahun 2012 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali ke depan. Bahkan dengan perbaikan berbagai infrastruktur ini dipercaya akan mampu memberikan akselerasi yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Bali ke depan, yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. *Data Strategis BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Agustus.
- Anonim. 2008. *Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2009*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 15 September.
- Anonim. 2009. *Bali Dalam Angka 2009*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Anonim. 2009. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2009. *Berita Resmi Statistik Provinsi Bali*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2009. *Indonesia Economic Outlook 2010*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Anonim. 2009. *Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2010*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 12 Nopember 2009.
- Anonim. 2009. *Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2009*. Jakarta: Kantor Kementerian Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Anonim. 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 28 April 2009.
- Anonim. 2010. *Bahan presentasi (slide) "Pembangunan Perekonomian Bali yang berkeadilan dalam Memperkuat Triple Track Strategy*, disampaikan dalam rangka rapat evaluasi pembangunan ekonomi Bali. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali – Tim Makro Ekonomi Bali.

- Anonim. 2010. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2010. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Juli.
- Anonim. 2010. *Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010*. Jakarta: Kantor Kementerian Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Anonim. 2010. *Optimalisasi Sinergi: Meningkatkan Koordinasi Seluruh Stakeholders Ekonomi Bali*, dalam seminar "Perekonomian Bali Semester I-2010". Denpasar: Bank Indonesia Denpasar, Agustus.
- Anonim. 2010. *Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUR RI ke-65 di depan sidang bersama DPR dan DPRD RI, 16 Agustus 2010*. Available from URL: <http://rotanindonesia.org>, di akses 5 Oktober 2010.
- Anonim. 2011. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan BPS RI, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2011. *Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2011*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 14 Januari.
- Anonim. 2011. *Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011*. Jakarta: Kantor Kementerian Keuangan Departemen Keuangan RI.
- P.Saliem dan Ariningsih. 2008. *Perubahan Konsumsi dan Pengeluaran Rumah tangga di Perdesaan: Analisis Data Susenas 1999 – 2005*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Desember. Available from URL: http://www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/MSU_1.pdf, di akses 19 Oktober 2010.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Reksoprayitno, Soediyono. 2000. *Ekonomi Makro (Pengantar Analisis Pendapatan Nasional) Edisi Kelima, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Liberty.

LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

TABEL 1.
 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BALI MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 2000, TAHUN 2008 -2011
 (DALAM JUTA RUPIAH)

KOMPONEN	2008	2009	2010	2011	2012
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24,842,673.70	31,463,086.94	39,250,824.25	44,398,064.62	48,473,906.00
1.1. Makanan	11,128,965.45	14,030,264.05	18,838,599.82	20,627,206.90	21,762,978.60
1.2. Non Makanan	13,713,708.25	17,432,822.89	20,412,224.43	23,770,857.72	26,710,927.41
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlab	460,359.14	767,490.95	556,818.81	609,719.31	683,328.05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,362,665.22	6,595,587.52	8,025,003.70	9,574,390.80	11,361,985.02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,321,272.72	13,971,712.71	18,220,244.59	22,598,442.17	28,586,200.69
5. Perubahan Stok	156,150.67	199,081.71	219,073.36	254,254.01	291,578.61
6. Diskrepansi Statistik	(328,809.24)	1,757,261.03	(581,250.50)	(1,281,734.89)	(328,892.71)
7. Ekspor Barang dan Jasa	40,609,549.04	53,472,946.46	66,368,495.46	76,258,002.42	89,471,184.12
7.1. Ekspor Luar Negeri	30,267,646.84	38,061,073.24	45,936,500.04	49,165,770.17	56,099,184.21
7.2. Ekspor Antar Daerah	10,341,902.20	15,411,873.23	20,431,995.41	27,092,232.25	33,371,999.91
8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	30,507,690.90	47,934,328.00	64,864,972.51	78,381,980.88	94,599,995.56
8.1. Impor Luar Negeri	18,856,210.29	29,709,855.34	37,270,906.95	41,847,498.68	44,159,917.87
8.2. Impor Antar Daerah	11,651,480.61	18,225,072.66	27,594,065.57	36,534,482.21	50,440,077.69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	51,916,170.34	60,292,239.32	67,194,237.15	74,029,157.55	83,939,294.21
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13,306,004.44	15,751,653.39	17,309,034.78	18,580,391.34	19,230,599.80
1.1. Makanan	6,352,785.48	7,646,326.59	7,970,401.91	8,329,926.30	8,465,600.14
1.2. Non Makanan	6,953,218.96	8,105,326.80	9,338,632.87	10,250,465.04	10,764,999.66
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlab	227,545.77	261,327.20	278,625.28	299,713.98	321,366.52
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,120,930.64	2,342,381.10	2,576,931.50	2,932,170.86	3,041,936.35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,844,272.43	6,307,720.70	7,374,879.29	8,247,368.71	9,837,186.33
5. Perubahan Stok	70,068.91	79,441.05	81,419.35	87,135.05	66,638.61
6. Diskrepansi Statistik	2,401,121.95	1,459,559.87	(1,180,765.52)	(1,414,907.87)	(623,743.94)
7. Ekspor Barang dan Jasa	16,493,532.84	18,383,153.04	21,706,908.79	23,403,189.87	24,417,883.02
7.1. Ekspor Luar Negeri	12,431,259.92	13,350,168.03	15,913,447.93	16,528,171.12	16,444,362.18
7.2. Ekspor Antar Daerah	4,062,272.91	5,032,985.01	5,793,460.86	6,875,018.74	7,973,520.84
8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	14,553,151.43	17,294,290.74	19,264,539.56	21,377,285.64	23,487,485.32
8.1. Impor Luar Negeri	6,470,121.77	8,223,296.93	8,675,212.28	9,061,022.90	8,983,856.90
8.2. Impor Antar Daerah	8,083,029.65	9,070,993.81	10,589,327.27	12,316,262.75	14,503,628.43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	25,910,325.54	27,290,945.61	28,882,493.90	30,757,776.28	32,804,381.36

TABEL 2.
DISTRIBUSI PDRB PROVINSI BALI MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 2000, TAHUN 2008 -2011
(DALAM PERSEN)

KOMPONEN	2008	2009	2010	2011	2012
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	47.85	52.18	58.41	59.97	57.75
1.1. Makanan	21.44	23.27	28.04	27.86	25.93
1.2. Non Makanan	26.42	28.91	30.38	32.11	31.82
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlab	0.89	1.27	0.83	0.82	0.81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.33	10.94	11.94	12.93	13.54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21.81	23.17	27.12	30.53	34.06
5. Perubahan Stok	0.30	0.33	0.33	0.34	0.35
6. Diskrepani Statistik	(0.63)	2.91	(0.87)	(1.73)	(0.39)
7. Ekspor Barang dan Jasa	78.22	88.69	98.77	103.01	106.59
7.1. Ekspor Luar Negeri	58.30	63.13	68.36	66.41	66.83
7.2. Ekspor Antar Daerah	19.92	25.56	30.41	36.60	39.76
8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	58.76	79.50	96.53	105.88	112.70
8.1. Impor Luar Negeri	36.32	49.28	55.47	56.53	52.61
8.2. Impor Antar Daerah	22.44	30.23	41.07	49.35	60.09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51.35	57.72	59.93	60.41	58.62
1.1. Makanan	24.52	28.02	27.60	27.08	25.81
1.2. Non Makanan	26.84	29.70	32.33	33.33	32.82
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlab	0.88	0.96	0.96	0.97	0.98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.19	8.58	8.92	9.53	9.27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22.56	23.11	25.53	26.81	29.99
5. Perubahan Stok	0.27	0.29	0.28	0.28	0.20
6. Diskrepani Statistik	9.27	5.35	(4.09)	(4.60)	(1.90)
7. Ekspor Barang dan Jasa	63.66	67.36	75.16	76.09	74.43
7.1. Ekspor Luar Negeri	47.98	48.92	55.10	53.74	50.13
7.2. Ekspor Antar Daerah	15.68	18.44	20.06	22.35	24.31
8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	56.17	63.37	66.70	69.50	71.60
8.1. Impor Luar Negeri	24.97	30.13	30.04	29.46	27.39
8.2. Impor Antar Daerah	31.20	33.24	36.66	40.04	44.21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

TABEL 3.
LAJU PERTUMBUHAN DAN INDEKS IMPLISIT
PDRB PROVINSI BALI MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN, TAHUN 2008 -2011
(DALAM PERSEN)

KOMPONEN	2008	2009	2010	2011	2012
[1]	[2]	[3]	[4]		
LAJU PERTUMBUHAN (ADHK 2000)					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.43	18.38	9.89	7.35	3.50
1.1. Makanan	1.10	20.36	4.24	4.51	1.63
1.2. Non Makanan	5.65	16.57	15.22	9.76	5.02
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlab	8.26	14.85	6.62	7.57	7.22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.98	10.44	10.01	13.79	3.74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.16	7.93	16.92	11.83	19.28
5. Perubahan Stok	16.21	13.38	2.49	7.02	(23.52)
6. Diskrepansi Statistik					
7. Ekspor Barang dan Jasa	16.98	11.46	18.08	7.81	4.34
7.1. Ekspor Luar Negeri	19.26	7.39	19.20	3.86	(0.51)
7.2. Ekspor Antar Daerah	10.50	23.90	15.11	18.67	15.98
8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	36.44	18.84	11.39	10.97	9.87
8.1. Impor Luar Negeri	26.59	27.10	5.50	4.45	(0.85)
8.2. Impor Antar Daerah	45.50	12.22	16.74	16.31	17.76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.97	5.33	5.83	6.49	6.65
INDEKS IMPLISIT					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	186.70	199.74	226.76	238.95	252.07
1.1. Makanan	175.18	183.49	236.36	247.63	257.08
1.2. Non Makanan	197.23	215.08	218.58	231.90	248.13
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlab	202.31	293.69	199.85	203.43	212.63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	252.84	281.58	311.42	326.53	373.51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	193.72	221.50	247.06	274.01	290.59
5. Perubahan Stok	222.85	250.60	269.07	291.79	437.55
6. Diskrepansi Statistik	(13.69)	120.40	49.23	90.59	52.73
7. Ekspor Barang dan Jasa	246.21	290.88	305.75	325.84	366.42
7.1. Ekspor Luar Negeri	243.48	285.10	288.66	297.47	341.15
7.2. Ekspor Antar Daerah	254.58	306.22	352.67	394.07	418.54
8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	209.63	277.17	336.71	366.66	402.77
8.1. Impor Luar Negeri	291.44	361.29	429.63	461.84	491.55
8.2. Impor Antar Daerah	144.15	200.92	260.58	296.64	347.78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	200.37	220.92	232.65	240.68	255.88

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://bali.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

Jl. Raya Puputan (Renon), Telepon: (0361) 238159, 243162, Denpasar 80226
Fax: (0361) 238162, E-Mail: bps5100@bps.go.id